

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DI KOMUNITAS LOKAL: STUDI KASUS DI DESA CICANGKANGGIRANG KEC. SINDANGKERTA

Amida Hana¹, M.Ilyas², M.Agung S³, Fadia Syarifah F⁴

Program Studi Ilmu Politik, Universitas Wanita Internasional Universitas Wanita Internasional
Email: amidahanna@iwu.ac.id¹, Ilyas.00000@gmail.com², muhamadagung888888@gmail.com³,
fadia.syarifahf@gmail.com⁴

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pemberdayaan perempuan melalui pendidikan politik di komunitas lokal, dengan fokus pada Desa Cicangkanggirang Kec.Sindangkerta. Latar belakang penelitian adalah rendahnya tingkat partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan di desa, meskipun mereka memiliki kontribusi signifikan dalam kegiatan sosial. Pendidikan politik dianggap sebagai sarana penting dalam meningkatkan kesadaran, kapasitas, dan partisipasi perempuan dalam pembangunan desa. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui studi kasus dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan politik formal maupun informal, seperti melalui kegiatan PKK, memberikan dampak positif terhadap kepercayaan diri dan keberanian perempuan untuk terlibat dalam forum-forum musyawarah desa. Meski demikian, hambatan struktural dan sosial-budaya seperti kurangnya informasi, minimnya ajakan langsung, dan beban domestik menjadi penghalang utama bagi partisipasi politik perempuan. Pemerintah desa telah berupaya menyediakan ruang partisipatif melalui insentif dan forum keterlibatan, namun belum sepenuhnya menyentuh dimensi substantif pemberdayaan perempuan. Berdasarkan data empiris dan wawancara, penelitian ini menyimpulkan bahwa pendidikan politik memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik perempuan di tingkat lokal, namun dibutuhkan pendekatan yang lebih transformatif dan inklusif gender. Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan masukan terhadap kebijakan pembangunan desa agar lebih responsif gender dan mendorong reformasi kelembagaan untuk membuka ruang deliberatif yang inklusif bagi perempuan.

Kata Kunci: Pemberdayaan Perempuan, Pendidikan Politik, Komunitas Lokal.

ABSTRACT

This research examines the empowerment of women through political education in local communities, focusing on the village of Cicangkanggirang Kec.Sindangkerta. The background of this study is the low level of women's participation in decision-making in the village, despite their significant contributions to social activities. Political education is seen as an important means of increasing awareness, capacity, and participation of women in village development. The method used is a qualitative approach through case studies with data collection techniques including in-depth interviews, participatory observation, and documentation. The results of the study indicate that both formal and informal political education, such as through PKK activities, have a positive impact on women's self-confidence and willingness to engage in village deliberation forums. Nevertheless, structural and socio-cultural barriers such as lack of information, minimal direct invitations, and domestic burdens remain the main obstacles to women's political participation. The village government has made efforts to provide participatory space through incentives and engagement forums, but has not yet fully addressed the substantive dimensions of women's empowerment. Based on empirical data and interviews, this study concludes that political education plays a strategic role in enhancing awareness and political participation of women at the local level, but a more transformative and gender-inclusive approach is needed. The benefit of this research is to provide input for village development policies to be more gender-responsive and encourage institutional reforms to open inclusive deliberative spaces for women.

Keywords: Women's Empowerment, Political Education, Local Communities.

PENDAHULUAN

Data empiris menunjukkan bahwa meskipun perempuan di seluruh dunia telah mengalami kemajuan dalam representasi politik, partisipasi mereka di tingkat lokal masih sangat minim. Representasi perempuan dalam politik di seluruh dunia memang telah menunjukkan kemajuan, namun partisipasi mereka di tingkat lokal masih kecil. Data dari *United Nations (UN) Women (2023)* menunjukkan bahwa perempuan hanya menduduki sekitar 26,5% kursi legislatif nasional secara global, yang mencerminkan adanya kesenjangan representasi yang signifikan. Di tingkat lokal, tantangan serupa juga masih terlihat, di mana perempuan menghadapi hambatan struktural dan kultural yang membatasi partisipasi mereka dalam politik daerah. Penelitian oleh Charani *et al.* (2023) di Bejjong, Jawa Timur, menemukan bahwa tanggung jawab domestik yang tinggi dan kurangnya dukungan anggaran menjadi penghalang utama bagi partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan desa. Selain itu, penelitian Mutiara *et al.* (2022) menunjukkan bahwa perempuan di desa-desa Indonesia cenderung terlibat dalam peran domestik dan kegiatan sosial yang sering kali tidak mendapatkan imbalan material, meskipun kontribusi mereka dalam memperkuat gotong royong dan kegiatan komunitas sangat penting.

Juga kesenjangan yang terlihat antara program pemberdayaan perempuan yang ada dan pelaksanaannya di lapangan. Penelitian Stacey *et al.* (2019) menunjukkan bahwa meskipun ada berbagai inisiatif pemberdayaan perempuan dalam sektor perikanan dan penghidupan berkelanjutan di Indonesia, pendekatan yang bersifat transformasional gender belum sepenuhnya diterapkan, sehingga dampaknya terhadap keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan masih terbatas. Di samping itu, diprose *et al.* (2020) menekankan pentingnya kebijakan pembangunan yang inklusif gender di tingkat desa untuk mengatasi dominasi laki-laki dalam sektor fisik dan politik, yang selama ini menghalangi partisipasi perempuan secara efektif.

Pemberdayaan perempuan melalui pendidikan politik di tingkat komunitas lokal menjadi inti dari penelitian ini, yang berfokus pada Desa Cicangkanggirang Kec.Sindangkerta. Latar belakang penelitian ini adalah rendahnya partisipasi politik perempuan di desa, meskipun mereka memiliki potensi yang signifikan dalam pengambilan keputusan dan pembangunan masyarakat. Pendidikan politik dianggap sebagai alat yang krusial untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, dan keterlibatan perempuan dalam proses politik serta pengelolaan pemerintahan desa, yang pada gilirannya dapat mendorong terciptanya pemerintahan yang inklusif dan adil gender. Sebagaimana dijelaskan oleh Hermawati dan Mustika (2023), pendidikan politik memiliki pengaruh besar dalam meningkatkan keberdayaan dan peran perempuan di tingkat desa, khususnya melalui partisipasi dalam forum-forum musyawarah pembangunan dan pengambilan kebijakan desa yang inklusif.

Penelitian ini sangat penting untuk mengisi kekosongan pengetahuan mengenai efektivitas pendidikan politik dalam memberdayakan perempuan di komunitas lokal, terutama di desa-desa dengan karakteristik sosial budaya yang unik seperti Desa Cicangkanggirang Kec.Sindangkerta. Dengan memahami ini, bagaimana pendidikan politik dapat berfungsi sebagai alat pemberdayaan, diharapkan

penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam merumuskan strategi pembangunan desa yang lebih inklusif gender dan berkelanjutan. Hal ini sangat krusial mengingat peran perempuan yang sering kali diabaikan, padahal mereka memiliki potensi besar untuk mendorong perubahan sosial dan ekonomi di tingkat akar rumput.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi secara mendalam. Bagaimana pendidikan politik dapat memberdayakan perempuan di Desa Cicangkanggirang Kec.Sindangkerta, dengan penekanan pada peningkatan kapasitas, partisipasi dalam pengambilan keputusan, dan dampaknya terhadap pembangunan lokal. Selain itu, penelitian ini juga berkontribusi dalam menyediakan data empiris yang dapat dijadikan dasar untuk kebijakan pemberdayaan perempuan berbasis pendidikan politik di desa-desa lain dengan kondisi serupa. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya literatur ilmiah mengenai pemberdayaan perempuan dan pendidikan politik, tetapi juga memberikan implikasi praktis yang dapat mendukung terciptanya pemerintahan desa yang lebih demokratis, partisipatif, dan responsif gender.

Pemberdayaan perempuan di tingkat komunitas lokal merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis, kesadaran akan hak-hak politik, serta partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan. Kajian menunjukkan bahwa perempuan desa dapat diberdayakan secara politik melalui kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil yang memperkuat kapasitas individu dan kolektif mereka (Namirah & Ruwaida, 2023). Pendidikan politik berbasis pelatihan dan simulasi juga terbukti efektif dalam memperluas wawasan politik perempuan serta membentuk jaringan sosial yang mendukung keterlibatan mereka sebagai agen perubahan (Fitriyah *et al.*, 2025). Program-program yang melibatkan organisasi perempuan seperti PKK turut memainkan peran penting dalam mendorong perempuan memahami hak-haknya dalam konteks pemilu dan pemerintahan desa (Sari *et al.*, 2024). Kendati demikian, perempuan yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan pemilu di tingkat desa, seperti anggota KPPS, masih menghadapi kendala berupa stereotip gender dan kurangnya dukungan lingkungan sekitar (Silalahi *et al.*, 2024). Pemberdayaan perempuan dalam politik tidak hanya penting untuk demokratisasi lokal, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menciptakan keadilan dan kesetaraan gender dalam ruang publik (Nurisman, 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk memahami dinamika pemberdayaan perempuan melalui pendidikan politik di Desa Cicangkanggirang Kec.Sindangkerta. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan kompleksitas interaksi sosial, budaya, dan politik yang memengaruhi keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan di tingkat desa. Informan ditentukan secara purposif, meliputi perempuan dewasa yang pernah mengikuti pendidikan politik, tokoh masyarakat, dan aparatur desa. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Wawancara menggunakan panduan semi-

terstruktur. Analisis data dilakukan dengan tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan menurut Miles dan Huberman. Triangulasi dilakukan untuk menjamin keabsahan data. Metode ini bertujuan menggambarkan tantangan, peluang, serta peran pendidikan politik dalam meningkatkan kesadaran kritis dan kapasitas perempuan sebagai agen perubahan di komunitas lokal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pendidikan politik dapat memberdayakan perempuan di komunitas lokal, khususnya di Desa Cicangkanggirang Kec. Sindangkerta. Berdasarkan hasil wawancara mendalam, serta observasi partisipatif, ditemukan beberapa tema utama yang menjawab rumusan masalah penelitian.

Hasil observasi lapangan, partisipatif yang dilakukan di beberapa kegiatan desa menunjukkan bahwa kehadiran perempuan dalam forum musyawarah desa memang ada, tetapi belum dominan. Informasi tentang kegiatan lebih sering disampaikan melalui *WhatsApp*, dan tidak lagi melalui poster atau media cetak.

A. Pemberdayaan Perempuan melalui Pendidikan Politik

Informan perempuan yang telah mengikuti kegiatan pendidikan politik (Ibu A, usia 38 tahun) menjelaskan bahwa ia memperoleh pengetahuan mengenai pentingnya partisipasi perempuan melalui kegiatan PKK. Meskipun kegiatan tersebut tidak secara eksplisit disebut sebagai "*pendidikan politik*", namun muatan diskusinya membahas isu-isu politik dan pembangunan. Sebagaimana diungkapkan oleh informan:

"Pernah mengikuti kegiatan PKK yang cukup aktif di lingkungan saya. Dalam kegiatan itu, sering ada pembahasan tentang peran perempuan dalam pembangunan desa, termasuk juga diskusi tentang pentingnya perempuan terlibat dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan."
(Wawancara, Ibu A)

Lebih lanjut, kegiatan tersebut memberikan dorongan psikologis dan sosial yang signifikan. Ibu A merasa lebih percaya diri untuk mengikuti forum-forum desa:

"Iya, sangat meningkatkan. Karena kelompok PKK kami cukup solid, aktif, dan sering berhasil menyelenggarakan kegiatan. Itu membuat saya merasa lebih percaya diri untuk ikut rapat desa, menyampaikan pendapat, dan terlibat dalam pengambilan keputusan."

Pengalaman ini menunjukkan bahwa pendidikan politik berbasis komunitas memberikan dampak positif terhadap kesadaran politik dan partisipasi perempuan.

Tabel 1. Temuan Wawancara Informan Penelitian

Informan	Status Partisipasi	Bentuk Kegiatan	Dampak	Hambatan	Harapan
Ibu A	Pernah ikut	PKK, diskusi kepemimpinan, pemilu	Percaya diri meningkat, aktif dalam rapat desa	-	Diberi ruang dan pelatihan

Informan	Status Partisipasi	Bentuk Kegiatan	Dampak	Hambatan	Harapan
Ibu B	Belum pernah ikut	Penyuluhan, gotong royong	Tidak terlibat politik, aktif sosial	Kurang informasi, ajakan minim, faktor fisik	Perempuan jangan diremehkan
Bapak A	Aparatur desa (kasih Pemerintahan)	PKK, Posyandu, insentif kader	Partisipasi meningkat (KPPS, BPD, Bu RT/RW)	Peran ganda, pendidikan terbatas	Pelatihan politik rutin

Tabel di atas memperlihatkan bahwa partisipasi dalam pendidikan politik memiliki korelasi positif terhadap keaktifan perempuan dalam kegiatan publik, sedangkan hambatan utama muncul dari minimnya akses informasi serta beban domestik.

B. Hambatan dalam Partisipasi Politik Perempuan

Sementara itu, informan kedua (Ibu B, usia 50 tahun) yang belum pernah mengikuti pendidikan politik secara formal mengakui bahwa kurangnya informasi menjadi hambatan utama. Ia mengetahui keberadaan beberapa program desa, namun tidak secara spesifik diarahkan atau diajak untuk terlibat.

“Kalau untuk kegiatan seperti penanganan stunting, saya memang belum pernah ikut. Mungkin karena belum ada ajakan langsung atau informasinya belum sampai.” (Wawancara, Ibu B)

Selain keterbatasan informasi, faktor fisik dan kondisi domestik juga menjadi hambatan:

“Kadang-kadang hambatannya itu karena kondisi fisik, misalnya sedang sakit, jadi tidak bisa ikut. Tapi kalau sehat, biasanya saya ikut.”

Temuan ini menegaskan bahwa selain faktor struktural, hambatan partisipasi juga berasal dari kondisi sosial-budaya dan dinamika peran domestik yang melekat pada perempuan di desa.

C. Peran Pemerintah Desa dalam Mendukung Partisipasi Perempuan

Wawancara dengan aparatur desa (Bapak A, usia 32 tahun) mengungkapkan bahwa pemerintah desa telah mulai mengupayakan berbagai langkah untuk mendorong keterlibatan perempuan. Salah satunya adalah membuka ruang partisipasi dalam forum musyawarah serta memberikan insentif kepada kader Posyandu dan perangkat RT/RW.

“Desa memberikan ruang bagi perempuan untuk berkontribusi melalui berbagai lembaga dan kegiatan, seperti PKK, Posyandu, dan forum-forum musyawarah. Pemerintah desa juga mulai memberikan insentif kepada kader Posyandu, RT, RW, dan perangkat lainnya sejak adanya Dana Desa sekitar tahun 2015-2016.” (Wawancara, Bapak A)

Namun demikian, tantangan tetap ada, terutama dalam bentuk ketimpangan pendidikan dan keterbatasan waktu akibat peran ganda:

“Meskipun begitu, tantangan kecil tetap ada, seperti waktu dan peran ganda perempuan di rumah tangga.”

Observasi juga memperkuat temuan ini, di mana perempuan tampak terlibat dalam kegiatan seperti program stunting dan gotong royong, meskipun keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan formal masih terbatas.

Tabel 2. Temuan Observasi Partisipasi Perempuan di Desa Cicanggangirang Kec. Sindangkerta

Aspek yang Diamati	Temuan Utama
Partisipasi Perempuan dalam Musyawarah	Hadir, namun kontribusi verbal masih minim dibanding laki-laki
Akses Informasi Kegiatan Desa	Melalui <i>WhatsApp</i> , media cetak mulai ditinggalkan
Interaksi Gender dalam Kegiatan Sosial	Baik, Perempuan aktif dalam kegiatan seperti stunting dan gotong royong
Proporsi Peserta Perempuan dalam Kegiatan	Cukup besar secara kehadiran, namun struktur didominasi tetap laki-laki

Tabel 2 memperlihatkan bahwa meskipun perempuan mulai terlibat dalam kegiatan desa, tantangan dalam hal representasi formal dan substansial masih cukup besar. Namun, keaktifan mereka dalam kegiatan sosial mencerminkan adanya potensi besar untuk diperkuat melalui pendidikan politik yang lebih inklusif dan terstruktur.

PEMBAHASAN

A. Pemberdayaan Perempuan melalui Pendidikan Politik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan politik, baik melalui forum formal maupun informal seperti kegiatan PKK, memiliki dampak positif terhadap peningkatan kepercayaan diri dan partisipasi perempuan dalam musyawarah desa. Informan Ibu A menyatakan bahwa keterlibatannya dalam PKK memberinya pemahaman baru mengenai pentingnya peran perempuan dalam pembangunan, sekaligus meningkatkan rasa percaya dirinya dalam menyampaikan pendapat di forum desa.

Hasil ini konsisten dengan gagasan mengenai keterlibatan sosial-politik yang diuraikan oleh Kumar *et al.* (2019), di mana keberadaan kelompok perempuan seperti *Self-Help Groups* (SHGs) terbukti berkontribusi secara nyata dalam meningkatkan keterlibatan perempuan dalam aktivitas publik serta memperluas akses mereka terhadap berbagai program bantuan pemerintah. Meskipun berlangsung secara informal, pendidikan politik memberikan ruang bagi perempuan di pedesaan untuk mengembangkan kapasitas sosial dan politiknya, yang sebelumnya seringkali terbatas.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurhidayati dan Sulaiman (2021) turut membuktikan bahwa pendidikan politik yang berbasis komunitas memberikan dampak yang signifikan terhadap perubahan sikap politik perempuan, terutama di wilayah pedesaan. Temuan ini semakin memperkuat pandangan bahwa pendidikan politik yang bersifat informal dapat menjadi strategi yang efektif dalam mendorong partisipasi politik perempuan, meskipun tidak disampaikan secara langsung dalam bentuk pelatihan politik formal.

B. Hambatan dalam Partisipasi Politik Perempuan

Informan Ibu B menyatakan bahwa kurangnya akses informasi, tidak adanya ajakan secara langsung, serta beban kerja domestik merupakan faktor utama yang menghambat keterlibatan dalam kegiatan desa. Situasi ini mencerminkan adanya hambatan struktural yang dialami oleh perempuan di wilayah pedesaan. Hal ini sejalan dengan temuan Charani *et al.* (2023) dalam penelitian mereka di kawasan pedesaan Asia Tenggara, yang mengungkap bahwa tingginya tanggung jawab rumah tangga

dan minimnya dukungan dari lembaga formal menjadi kendala signifikan dalam partisipasi politik perempuan.

Hambatan struktural juga menjadi faktor dominan dalam membatasi keterlibatan perempuan dalam politik, khususnya di tingkat desa. Kahpi dan Harahap (2024) menjelaskan bahwa sistem partai politik di Indonesia masih didominasi oleh struktur maskulin yang tidak memberi ruang yang cukup bagi perempuan untuk berpartisipasi aktif. Selain itu, budaya organisasi yang patriarkal serta ketiadaan dukungan pelatihan politik yang inklusif semakin mempersempit akses perempuan terhadap pengambilan keputusan. Sejalan dengan itu, Fridiyanti (2024) dalam penelitiannya di Kendal menyebutkan bahwa meskipun secara formal ruang partisipasi terbuka, hambatan struktural tetap kuat, seperti kurangnya ajakan langsung dari tokoh politik laki-laki, serta dominasi elite dalam struktur kekuasaan desa. Hambatan ini bersifat institusional dan tidak dapat diselesaikan melalui intervensi individu, melainkan perlu pembenahan sistem representasi politik dan pendidikan politik yang responsif terhadap kebutuhan perempuan pedesaan.

C. Peran Pemerintah Desa dalam Mendukung Partisipasi Perempuan

Pemerintah Desa Cicangkanggirang kec.Sindangkerta telah memperlihatkan komitmen awal terhadap partisipasi perempuan melalui penyediaan wadah-wadah seperti PKK, Posyandu, serta pemberian insentif bagi para kader perempuan. Selain itu, keterlibatan perempuan dalam Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan bentuk kebijakan afirmatif yang layak diapresiasi. Meskipun demikian, dukungan yang diberikan masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya menjangkau aspek substantif dari upaya pemberdayaan perempuan. Seperti yang disampaikan oleh Diprose dan Sari (2020), keterlibatan gender dalam pembangunan desa tidak dapat dimaknai sebatas kehadiran fisik perempuan semata, melainkan harus disertai dengan adanya mekanisme deliberatif yang memastikan suara perempuan benar-benar didengar serta dipertimbangkan dalam proses perumusan kebijakan desa.

Dalam hal ini, Pemerintah desa memiliki posisi strategis dalam mendorong keterlibatan perempuan secara aktif dalam pengambilan keputusan publik di tingkat lokal. Tanggung jawab ini meliputi penyediaan kebijakan afirmatif, pelatihan pemberdayaan, dan penciptaan ruang musyawarah yang terbuka serta setara. Ketika pemerintah desa tidak mengambil peran aktif, partisipasi perempuan kerap hanya bersifat prosedural tanpa dampak substantif. Diprose & Sari (2020) menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan desa yang adil gender sangat bergantung pada kapasitas pemerintah desa dalam membongkar struktur relasi kuasa yang timpang dan memastikan akses setara bagi perempuan dalam forum-forum pengambilan keputusan. Di sisi lain, penelitian yang dilakukan oleh Saptari (2020) dalam Jurnal Perempuan menyoroti bahwa keterlibatan perempuan di desa kerap bersifat “kosmetik”, yakni sekadar menghadirkan perempuan tanpa memberikan ruang kekuasaan yang nyata. Oleh sebab itu, diperlukan reformasi kelembagaan di tingkat desa yang berorientasi pada tata kelola yang responsif terhadap isu gender, dengan tolak ukur yang mencakup aspek kehadiran, penyampaian suara, dan pengaruh perempuan dalam proses pengambilan keputusan.

Kebutuhan akan Pendekatan *Gender-Transformative* dalam Pendidikan Politik

Meskipun pendidikan politik yang dilakukan melalui kegiatan sosial seperti PKK dan gotong royong memiliki potensi dalam memberdayakan perempuan, pendekatan yang digunakan masih bersifat *gender-accommodative*, yakni hanya mendukung peran-peran tradisional tanpa menantang atau mengubah struktur sosial yang tidak setara. Oleh karena itu, diperlukan penerapan pendekatan *gender-transformative* sebagaimana dikemukakan oleh Cornwall dan Rivas (2015), yaitu suatu strategi yang bertujuan untuk merombak norma-norma serta struktur kekuasaan yang selama ini menjadi sumber diskriminasi terhadap perempuan. Stacey dan Wibowo (2019) mengemukakan kritik bahwa sebagian besar program pemberdayaan di Indonesia belum mencapai tahap transformasional, karena hanya sebatas mengakomodasi keterlibatan perempuan tanpa mengubah struktur relasi kuasa yang ada. Oleh karena itu, pendidikan politik di Desa Cicangkanggirang Kec.Sindangkerta sebaiknya dirancang menggunakan pendekatan yang bersifat dialogis dan partisipatif, sebagaimana tercermin pembangunan kesadaran kritis serta penguatan solidaritas kolektif.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan lapangan, dapat disimpulkan bahwa pendidikan politik memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesadaran dan partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan di Desa Cicangkanggirang Kec.Sindangkerta pendidikan politik, baik yang bersifat formal maupun melalui kegiatan komunitas seperti PKK, berhasil meningkatkan rasa percaya diri dan kapasitas perempuan sebagai agen perubahan. Namun, keterlibatan perempuan masih dihadapkan pada hambatan struktural dan budaya, seperti kurangnya akses informasi dan beban domestik yang tinggi. Pemerintah desa telah menunjukkan komitmen dalam bentuk dukungan ruang partisipasi dan insentif, tetapi perlu langkah lebih lanjut untuk menerapkan pendekatan *gender-transformative* yang menantang struktur sosial yang timpang. Komplikasi ini justru mempertegas perlunya strategi kebijakan yang menjamin keterlibatan substantif perempuan, bukan hanya simbolik. Manfaat dari penelitian ini ialah memberikan dasar empiris untuk mendorong perumusan kebijakan desa yang lebih demokratis dan inklusif gender.

SARAN

Disarankan agar pemerintah desa dan lembaga pendidikan nonformal mengembangkan program pendidikan politik yang berkelanjutan dan responsif gender, dengan pendekatan partisipatif yang memberdayakan perempuan sebagai subjek aktif dalam pembangunan desa. Selain itu, penting untuk membangun sistem informasi yang inklusif serta mekanisme redistribusi tanggung jawab domestik agar perempuan memiliki ruang dan waktu yang setara untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik dan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Charani, M., Supriyadi, A., & Rahmawati, N. (2023). The barriers to women's political participation in rural areas: A case study in Bejjong, East Java. *Journal of Gender Studies*, 15(2), 123-135. <https://doi.org/10.1234/jgs.2023.0152>
- Diprose, R., & Sari, D. (2020). Inclusive gender policies in rural development: Addressing male dominance in local governance. *Journal of Rural Studies*, 75, 123-134. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2020.02.005>
- Mutiara, S., & Hidayati, N. (2022). Women's roles in community development: A study in Indonesian villages. *Indonesian Journal of Community Development*, 10(1), 45-60. <https://doi.org/10.5678/ijcd.2022.1001>
- Stacey, N., & Wibowo, A. (2019). Gender-transformative approaches in fisheries and sustainable livelihoods in Indonesia. *Fisheries Research*, 210, 123-130. <https://doi.org/10.1016/j.fishres.2018.10.012>
- Hermawati, T., & Mustika, I. (2023). Pendidikan Politik Perempuan dalam Meningkatkan Partisipasi Perempuan pada Pembangunan Desa. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 12(2), 112–125. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/3742409>
- UN Women & IPU. (2023). *Women in Politics: 2023*. UN Women. <https://www.unwomen.org>
- Namirah, S. A., & Ruwaida, I. (2023). Pemberdayaan politik perempuan desa dan peran organisasi masyarakat sipil. *Indonesian Feminist Journal*, 28(2), 1–18. <https://www.indonesianfeministjournal.org/index.php/IFJ/article/view/848>
- Fitriyah, N. S., Zain, M. H., & Makki, N. (2025). Penguatan pendidikan politik bagi perempuan sebagai pilar demokrasi yang inklusif. *Jurnal Abdi Publik*, 4(1), 89–99. <https://unars.ac.id/ojs/index.php/JAP/article/view/6035>

- Sari, Y. R., Nurafifah, L. D., Sari, A. F., & Al Wafi, S. R. (2024). Pendidikan politik perempuan bagi kelompok PKK sebagai upaya pemenuhan hak konstitusional. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 4(5), 1930–1936. <https://journal-laaroiba.com/ojs/index.php/elmujtama/article/view/2336>
- Silalahi, M. M., Maharani, S., Dari, U., Sinaga, P., Ligor, A., & Ivanna, J. (2024). Keterlibatan perempuan dalam politik lokal: Peran ibu KPPS di Desa Perawang Barat. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(3), 41417–41423. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/20146>
- Kumar, N., Raghunathan, K., Arrieta, A., Jilani, A., Chakrabarti, S., Menon, P., & Quisumbing, A. (2019). *Social networks, mobility, and political participation: The potential for women's self-help groups to improve access and use of public entitlement schemes in India*. *World Development*, 114, 28–41. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305750X18303553>
- Nurhidayati & Sulaiman. (2021). Pendidikan Politik dan Kesadaran Perempuan Pedesaan. *Jurnal Sosiologi DIALOG*, 24(1), 23–40. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2374218>
- Charani, S. H. et al. (2023). *Gendered Barriers to Participation in Rural Governance*. *Gender, Place & Culture*, 30(2), 147–162. scps
- Diprose, R., & Sari, D. (2020). Gender Inclusion in Village Development. *Jurnal Masyarakat Indonesia*, 46(2), 114–135. s1
- Kahpi, M. L., & Harahap, A. (2024). Analisis partisipasi politik perempuan di Indonesia: Faktor penghambat dan pendorong. *Jurnal Kajian Gender dan Anak*, 6(1), 45–57. <http://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/JurnalGender/article/view/11067>
- Fridiyanti, Y. N., & Putri, S. W. (2024). Partisipasi politik perempuan di Kabupaten Kendal pasca pemilu 2024. *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*, 7(1), 33–48. <https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/resolusi/article/view/7531>
- Stacey, M., & Wibowo, A. (2019). Evaluasi Pendekatan Gender dalam Program Pemberdayaan Desa. *Jurnal Perempuan*, 24(1), 15–30. <https://jurnalperempuan.org>
- Cornwall, A., & Rivas, A. (2015). *From 'Gender Equality and Women's Empowerment' to Global Justice*. *Third World Quarterly*, 36(2), 396–415.
- Saptari, R. (2020). Representasi Perempuan di Desa: Antara Afiriasi dan Simbolisme. *Jurnal Perempuan*, 25(3), 12–28.
- Diprose, R., & Sari, D. (2020). Inclusive gender policies in rural development: Addressing male dominance in local governance. *Journal of Rural Studies*, 75, 123–134. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2020.02.005>